

DAFTAR ISIAN PENGUSULAN KEGIATAN (DIPK) PINJAMAN LUAR NEGERI

A. Bahasa Indonesia

1. Judul Kegiatan	:	Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Patimban
2. Durasi Pelaksanaan	:	5 Tahun (Tahap I)
3. Lokasi Pelaksanaan	:	Pembangunan dilaksanakan di di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat Indonesia
4. Instansi Pengusul	:	Kementerian Perhubungan
5. Instansi Pelaksana	:	Kementerian Perhubungan
6. Latar Belakang:		<p>Rencana pembangunan pelabuhan internasional pada awalnya direncanakan di Cilamaya - Karawang yang berada di Kawasan Pantai Utara Jawa Barat sebagai perwujudan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 dan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 414 Tahun 2013 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.</p> <p>Menindaklanjuti rapat pembahasan Pelabuhan Cilamaya tanggal 2 April 2015 di Karawang yang dipimpin Bapak Wakil Presiden dan dihadiri oleh Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wakil Gubernur Jawa Barat, Plt Bupati Karawang dan Dirut PT. Pertamina (Persero), terkait adanya area eksplorasi migas di area pelabuhan dan alur Pelabuhan Cilamaya, Bapak Wakil Presiden telah memberikan arahan untuk melakukan penggeseran lokasi Pelabuhan Cilamaya.</p> <p>Penentuan lokasi baru pelabuhan pengganti Cilamaya telah dilakukan melalui studi Pra-FS dan FS Pembangunan Pelabuhan Baru di Pantai Utara Jawa Barat pada Tahun 2015 melalui anggaran Kementerian Perhubungan. Berdasarkan hasil kajian dalam dokumen pra studi kelayakan (Pra-FS) Pelabuhan Pantai Utara Jawa Barat, telah dihasilkan rekomendasi usulan lokasi mengacu pada penilaian aspek kelayakan pengembangan pelabuhan baru berdasarkan aspek tata ruang, aspek transportasi wilayah, aspek ekonomi wilayah, aspek sosial kependudukan, aspek lingkungan, dan aspek teknis. Berdasarkan hasil metode skoring, didapatkan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang sebagai prioritas pertama urutan kelayakan lokasi rencana pengganti Cilamaya.</p> <p>Selanjutnya pemilihan lokasi di dalam studi Pra-FS dilakukan melalui metode penyaringan (<i>screening method</i>) untuk menyaring atau menentukan lokasi pelabuhan – pelabuhan dengan menggunakan parameter kelayakan kualitatif dari 4 (empat) aspek, yaitu aspek hukum dan kelembagaan, aspek transportasi, aspek teknis, dan aspek keselamatan pelayaran terutama</p>

terhadap konflik dengan pipa migas di wilayah lepas pantai (*offshore*) milik PT. Pertamina. Mengacu hasil analisis metode evaluasi penyaringan, didapatkan hasil penilaian kelayakan dari masing-masing lokasi rencana pelabuhan di mana terpilih lokasi yang paling layak dan dari empat aspek tidak ada satu pun unsur yang tidak layak adalah lokasi Patimban di Kabupaten Subang.

Berdasarkan hasil analisis di atas, lokasi rencana pelabuhan baru di Pantai Utara Jawa Barat yang memenuhi syarat dan direkomendasikan untuk dilanjutkan pada tahapan berikutnya atau tahapan studi kelayakan (*Feasibility Study*) adalah Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Kemudian dengan mengacu hasil studi Pra-FS dilakukan kajian penyusunan FS Pembangunan Pelabuhan Baru Pantai Utara Jawa Barat pada lokasi Patimban, Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil perhitungan keuangan dan ekonomi, Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban, dinyatakan **Layak** untuk dibangun. Hal ini ditunjukkan dengan masih fleksibelnya tingkat imbal hasil ekonomi dan keuangan sesuai kriteria yang ditetapkan berdasarkan Peraturan dan Perundangan yang terkait, khususnya Keputusan Menteri Perhubungan nomor 83 tahun 2010, tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta untuk Infrastruktur Pelabuhan.

Berdasarkan hasil kajian dalam studi FS, proyeksi kebutuhan jasa pelayanan kontainer Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Jawa Barat pada Tahun 2037, akan mencapai ultimate 7,5 juta TEU's. Untuk Tahap I dalam rangka penyediaan kapasitas untuk kebutuhan minimum operasional pada tahun 2019 (Fase I) direncanakan dibangun terminal kontainer dengan kapasitas sebesar 250.000 TEU's yang kemudian akan dibangun dengan tambahan kapasitas (Fase II) 3.139.000 TEU's. Penambahan kapasitas akan terus dilakukan pada Tahap II dan III hingga mencapai kapasitas ultimate 7.5 juta TEUs. Pelabuhan Patimban direncanakan juga untuk melayani bongkar muat kendaraan dengan kapasitas total 485.000 CBU's, dan terminal Roro.

Pembangunan Pelabuhan pengganti Cilamaya di lokasi Patimban Subang selain untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kargo petikemas dan kendaraan juga dimaksudkan untuk mengurangi beban daerah belakang Pelabuhan Tanjung Priok terkait dengan kemacetan dan jaraknya yang cukup jauh dari pusat industri sehingga diharapkan dapat mengurangi tingginya biaya logistik yang disebabkan oleh kemacetan pada akses jalan dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok serta mengurangi dampak terkait lingkungan.

Pembangunan Pelabuhan Patimban Subang meliputi 2 (dua) area pembangunan yaitu:

1. Area pelabuhan untuk menampung kegiatan utama dan menjadi fasilitas pokok lahan sisi darat yang meliputi antara lain terminal petikemas, terminal kendaraan dan terminal Roro dengan berbagai utilitas yang diperlukan, untuk dapat mengakomodir kapal *Ultra-Large Container Ships (ULCS)* yang berkapasitas 13.000 TEU's dengan kedalaman alur pelayaran minimal -17 m LWS. Area ini akan dibangun dengan cara reklamasi lahan seluas 301 Hektar.

2. *Back up area* untuk kegiatan penunjang pelabuhan, dibangun di atas lahan seluas 205 Hektar dengan cara membebaskan lahan daratan yang peruntukannya saat ini berupa tegalan, tambak ikan dan sebagian kecil pemukiman.

Fasilitas pokok pelabuhan di lahan daratan reklamasi meliputi:

1. Terminal kontainer beserta lapangan penumpukan;
2. Terminal kendaraan dan lapangan penumpukan kendaraan;
3. Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
4. Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker);
5. Instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
6. Akses jalan dan/atau jalur kereta api;
7. Fasilitas pemadam kebakaran;
8. Terminal Kapal Roro berikut fasilitas tempat tunggu kendaraan bermotor;

Sedangkan kebutuhan lahan *back up area* Pelabuhan Patimban digunakan untuk kegiatan penunjang pelabuhan yang meliputi antara lain lapangan penumpukan petikemas, gudang, area parkir,

1. Area distribusi dan konsolidasi kargo dari kawasan industri (*cargo distribution centre* atau CDC);
2. Kawasan perkantoran untuk menunjang aktivitas pengguna jasa pelabuhan dan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
3. Lapangan penumpukan kontainer lini II;
4. Area pergudangan;
5. Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;
6. CFS dan bengkel perbaikan peralatan dan kontainer;
7. Fasilitas penimbangan truk bermuatan;
8. Areal pengembangan pelabuhan;
9. Fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur);
10. Utilitas (gardu induk listrik, drainase, jaringan pipa air bersih dan kabel listrik);
11. Tempat penampungan limbah.

7. Ruang Lingkup Kegiatan:

- a. Penyusunan desain dan spesifikasi teknis;
- b. Pelaksanaan pelelangan;
- c. Pelaksanaan kegiatan konstruksi;
- d. Pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan.

8. Keluaran/Outputs:

- a. Menyediakan fasilitas pelabuhan, yang terdiri dari:
 1. Dermaga kontainer dengan panjang total 4.320 m beserta fasilitas terminal penumpukan seluas 301 Ha;
 2. Dermaga terminal kendaraan beserta fasilitas terminal dengan total panjang 690m;
 3. Dermaga terminal ro-ro sepanjang 200 m;
 4. Dermaga kapal negara sepanjang 930 m;
 5. Pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan hingga -17m LWS;
 6. *Breakwater* dan *seawall*;
 7. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

b. Membangun jalan akses menuju pelabuhan sepanjang 8 km.		
9. Hasil/ <i>Outcomes</i> :		
a. Menekan biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi (industri manufaktur) dengan <i>outlet</i> pelabuhan;		
b. Memperkuat ketahanan perekonomian dengan menyediakan <i>backup outlet</i> pelabuhan yang melayani wilayah industri yang menghasilkan $\pm 70\%$ kargo dalam negeri;		
c. Menurunkan tingkat kemacetan dan mengurangi kerugian akibat kemacetan di Ibukota Negara dengan memindahkan sebagian trafik angkutan berat ke luar wilayah Ibukota;		
d. Menekan penggunaan BBM (bersubsidi) dan meningkatkan utilisasi truk kontainer dengan memperpendek jarak tempuh dari industri manufaktur ke pelabuhan;		
e. Menjamin keselamatan pelayaran dan area eksplorasi migas di kawasan lepas pantai Utara Jawa Barat;		
f. Membantu pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat secara umum.		
10. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019:		
○ Sasaran Makro		
○ Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat		
✓ Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan		
○ Sasaran Dimensi Pemerataan		
○ Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah		
○ Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan		
11. Indikasi Nilai Pembiayaan:		
a. Pinjaman	:	USD 2.208.000.000
b. Dana Pendamping	:	USD 595.000.000
c. KPS	:	USD 285.000.000
Total	:	USD 3.088.000.000

DOKUMEN USULAN KEGIATAN (DUK)

PINJAMAN LUAR NEGERI

1. Judul Kegiatan	:	<i>Pembangunan Pelabuhan Patimban Subang Jawa Barat</i>
-------------------	---	---

2. Judul Program (untuk K/L)	:	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kepelabuhanan
------------------------------	---	--

3. Instansi Pengusul	:	<div style="margin-left: 20px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Kementerian/Lembaga mengusulkan kegiatan untuk: <div style="margin-left: 20px;"> <input checked="" type="checkbox"/> pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; <input type="checkbox"/> dihibahkan (sebagian/seluruhnya) kepada Pemerintah Daerah ... (sebutkan); atau <input type="checkbox"/> dilaksanakan oleh beberapa instansi pelaksana. </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> Pemerintah Daerah mengusulkan kegiatan: <div style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> sebagai penerusan pinjaman; atau <input type="checkbox"/> untuk diteruskan/dan/atau diterushibahkan ke BUMD : (sebutkan) . </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> BUMN mengusulkan kegiatan yang direncanakan sebagai penerusan pinjaman </div>
----------------------	---	--

4. Instansi Pelaksana: Kementerian Perhubungan
--

5. Latar Belakang:
<p>Rencana pembangunan pelabuhan internasional pada awalnya direncanakan di Cilamaya - Karawang yang berada di Kawasan Pantai Utara Jawa Barat sebagai perwujudan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 dan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 414 Tahun 2013 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.</p> <p>Menindaklanjuti rapat pembahasan Pelabuhan Cilamaya tanggal 2 April 2015 di Karawang yang dipimpin Bapak Wakil Presiden dan dihadiri oleh Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wakil Gubernur Jawa Barat, Plt Bupati Karawang dan Dirut PT. Pertamina (Persero), terkait adanya area eksplorasi migas di area pelabuhan dan alur Pelabuhan Cilamaya, Bapak Wakil Presiden telah memberikan arahan untuk melakukan penggeseran lokasi Pelabuhan Cilamaya.</p> <p>Penentuan lokasi baru pelabuhan pengganti Cilamaya telah dilakukan melalui studi Pra-FS dan FS Pembangunan Pelabuhan Baru di Pantai Utara Jawa Barat pada Tahun 2015 melalui anggaran Kementerian Perhubungan. Berdasarkan hasil kajian dalam dokumen pra studi kelayakan (Pra-FS), telah dihasilkan rekomendasi usulan lokasi mengacu pada penilaian aspek kelayakan pengembangan pelabuhan baru berdasarkan aspek tata ruang, aspek transportasi wilayah, aspek</p>

ekonomi wilayah, aspek sosial kependudukan, aspek lingkungan, dan aspek teknis. Berdasarkan hasil metode skoring, didapatkan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang sebagai prioritas pertama urutan kelayakan lokasi rencana pengganti Cilamaya.

Selanjutnya pemilihan lokasi di dalam studi Pra-FS dilakukan melalui metode penyaringan (*screening method*) untuk menyaring atau menentukan lokasi pelabuhan – pelabuhan dengan menggunakan parameter kelayakan kualitatif dari 4 (empat) aspek, yaitu aspek hukum dan kelembagaan, aspek transportasi, aspek teknis, dan aspek keselamatan pelayaran terutama terhadap konflik dengan pipa migas di wilayah lepas pantai (*offshore*) milik PT. Pertamina. Mengacu hasil analisis metode evaluasi penyaringan, didapatkan hasil penilaian kelayakan dari masing-masing lokasi rencana pelabuhan di mana terpilih lokasi yang paling layak dan dari empat aspek tidak ada satu pun unsur yang tidak layak adalah lokasi Patimban di Kabupaten Subang.

Berdasarkan hasil analisis di atas, lokasi rencana pelabuhan baru di Pantai Utara Jawa Barat yang memenuhi syarat dan direkomendasikan untuk dilanjutkan pada tahapan berikutnya atau tahapan studi kelayakan (*Feasibility Study*) adalah Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.

Kemudian dengan mengacu hasil studi Pra-FS dilakukan kajian penyusunan FS Pembangunan Pelabuhan Baru Pantai Utara Jawa Barat pada lokasi Patimban, Kabupaten Subang. Berdasarkan hasil perhitungan keuangan dan ekonomi, Proyek Pembangunan Pelabuhan Patimban, dinyatakan **Layak** untuk dibangun. Hal ini ditunjukkan dengan masih fleksibelnya tingkat imbal hasil ekonomi dan keuangan sesuai kriteria yang ditetapkan berdasarkan Peraturan dan Perundangan yang terkait, khususnya Keputusan Menteri Perhubungan nomor 83 tahun 2010, tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta untuk Infrastruktur Pelabuhan.

Berdasarkan hasil kajian dalam studi FS, proyeksi kebutuhan jasa pelayanan kontainer Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang Jawa Barat pada Tahun 2037, akan mencapai ultimate 7,5 juta TEU's. Untuk Tahap I dalam rangka penyediaan kapasitas untuk kebutuhan minimum operasional pada tahun 2019 (Fase I) direncanakan dibangun terminal kontainer dengan kapasitas sebesar 250.000 TEU's yang kemudian akan dibangun dengan tambahan kapasitas (Fase II) 3.139.000 TEU's. Penambahan kapasitas akan terus dilakukan pada Tahap II dan III hingga mencapai kapasitas *ultimate* 7.5 juta TEUs. Pelabuhan Patimban direncanakan juga untuk melayani bongkar muat kendaraan dengan kapasitas total 485.000 CBU's, dan terminal Roro.

Pembangunan Pelabuhan pengganti Cilamaya di lokasi Patimban Subang selain untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kargo petikemas dan kendaraan juga dimaksudkan untuk mengurangi beban daerah belakang Pelabuhan Tanjung Priok terkait dengan kemacetan dan jaraknya yang cukup jauh dari pusat industri sehingga diharapkan dapat mengurangi tingginya biaya logistik yang disebabkan oleh kemacetan pada akses jalan dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok serta mengurangi dampak terkait lingkungan.

Pembangunan Pelabuhan Patimban Subang meliputi 2 (dua) area pembangunan yaitu:

1. Area pelabuhan untuk menampung kegiatan utama dan menjadi fasilitas pokok lahan sisi darat yang meliputi antara lain terminal petikemas, terminal kendaraan dan terminal Roro dengan berbagai utilitas yang diperlukan, untuk dapat mengakomodir kapal *Ultra-Large Container Ships (ULCS)* yang berkapasitas 13.000 TEU's dengan kedalaman alur pelayaran minimal -17 m LWS. Area ini akan dibangun dengan cara reklamasi lahan seluas 301 Hektar.
2. *Back up area* untuk kegiatan penunjang pelabuhan, dibangun di atas lahan seluas 205 Hektar dengan cara membebaskan lahan daratan yang peruntukannya saat ini berupa tegalan, tambak ikan dan sebagian kecil pemukiman.

Fasilitas pokok pelabuhan di lahan daratan reklamasi meliputi:

1. Terminal kontainer beserta lapangan penumpukan;
2. Terminal kendaraan dan lapangan penumpukan kendaraan;
3. Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa;
4. Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker);
5. Instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
6. Akses jalan dan/atau jalur kereta api;
7. Fasilitas pemadam kebakaran;
8. Terminal Kapal Roro berikut fasilitas tempat tunggu kendaraan bermotor;

Sedangkan kebutuhan lahan *back up area* Pelabuhan Patimban digunakan untuk kegiatan penunjang pelabuhan yang meliputi antara lain lapangan penumpukan petikemas, gudang, area parkir,

1. Area distribusi dan konsolidasi kargo dari kawasan industri (*cargo distribution centre* atau CDC);
2. Kawasan perkantoran untuk menunjang aktivitas pengguna jasa pelabuhan dan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
3. Lapangan penumpukan kontainer lini II;
4. Area pergudangan;
5. Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;
6. CFS dan bengkel perbaikan peralatan dan kontainer;
7. Fasilitas penimbangan truk bermuatan;
8. Areal pengembangan pelabuhan;
9. Fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur);
10. Utilitas (gardu induk listrik, drainase, jaringan pipa air bersih dan kabel listrik);
11. Tempat penampungan limbah.

6. Tujuan Kegiatan:

- a. Menambah ketersediaan fasilitas pelabuhan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi;
- b. memenuhi kebutuhan pelayanan petikemas dan pengangkutan kendaraan;
- c. mengurangi beban kemacetan di daerah sekitar Pelabuhan Tanjung Priok;
- d. mengurangi polusi udara dan dampak lingkungan lainnya akibat kemacetan pada jalan

- akses Pelabuhan Tanjung Priok;
- e. mengurangi tingginya biaya logistik yang disebabkan oleh kemacetan pada akses jalan dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok terkait kemacetan dan jaraknya yang cukup jauh dari pusat-pusat industri di Karawang dan Cikarang;
- f. menjamin keselamatan pelayaran dan operasi fasilitas migas di sekitar lokasi pelabuhan.

7. Ruang Lingkup Kegiatan:

- a. Penyusunan desain serta spesifikasi teknis;
- b. Pelaksanaan pelelangan;
- c. Pelaksanaan kegiatan konstruksi;
- d. Pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan;
- e. Konsesi dan kerjasama pengoperasian pelabuhan.

8. Lokasi: Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat

9. Hasil Yang Diharapkan:

A. Keluaran/*Outputs*:

1. Ketersediaan fasilitas terminal kontainer untuk mendukung pertumbuhan dan kegiatan kawasan industri khususnya di wilayah Jawa Barat bagian Tengah dan Utara;
2. Ketersediaan fasilitas terminal kendaraan bermotor dalam rangka menunjang pertumbuhan industri otomotif nasional;
3. Ketersediaan fasilitas kapal Roro untuk penyeberangan antar pulau.

B. Hasil/*Outcomes*:

1. Menekan biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi (industri manufaktur) dengan outlet pelabuhan;
2. Memperkuat ketahanan perekonomian dengan menyediakan backup outlet pelabuhan yang melayani wilayah industri yang menghasilkan $\pm 70\%$ kargo dalam negeri;
3. Menurunkan tingkat kemacetan dan mengurangi kerugian akibat kemacetan di Ibukota Negara dengan memindahkan sebagian trafik angkutan berat ke luar wilayah Ibukota;
4. Menekan penggunaan BBM (bersubsidi) dan meningkatkan utilisasi truk kontainer dengan memperpendek jarak tempuh dari industri manufaktur ke pelabuhan;
5. Menjamin keselamatan pelayaran dan area eksplorasi migas di kawasan lepas pantai Utara Jawa Barat;
6. Membantu pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat secara umum.

C. Instansi Lain yang Terkait dalam Pencapaian Hasil/*Outcomes*:

Ada, sebutkan : Kemenetrian PU dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan jalan akses, Kementerian ESDM untuk menjamin keselamatan pelayaran dan operasi migas, Kementerian LHK untuk penyusunan AMDAL serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Subang dalam rangka penyesuaian tata ruang wilayah.

Tidak ada

D. Keterkaitan Keluaran/*Outputs* dan/atau Hasil/*Outcomes* dengan Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dan/atau Sasaran Bidang dalam RPJMN 2015-2019:

1. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan;
2. Mendukung pembangunan konektivitas nasional;
3. Sarana dan prasarana penunjang implementasi tol laut.

E. Keterkaitan Keluaran/*Outputs* dan/atau Hasil/*Outcomes* dalam Agenda Pembangunan Wilayah dalam RPJMN 2015-2019:

1. Mendukung rencana aksi pembangunan kelautan dan maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan maritim bagi kesejahteraan rakyat;
2. Mendukung pengembangan sistem koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan maritim;
3. Mendukung peningkatan sarana prasarana, cakupan pengawasan dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan;
4. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi kelautan;
5. Mendukung pengembangan tol laut dalam mendukung konektivitas dan sistem logistik.

10. Rencana Pelaksanaan:

- a. Durasi : 5 tahun (Konstruksi Tahap I terdiri dari Fase I dan Fase II)
- b. Perkiraan Tahun Pertama Pelaksanaan: 2018
- c. Jadwal Pelaksanaan:

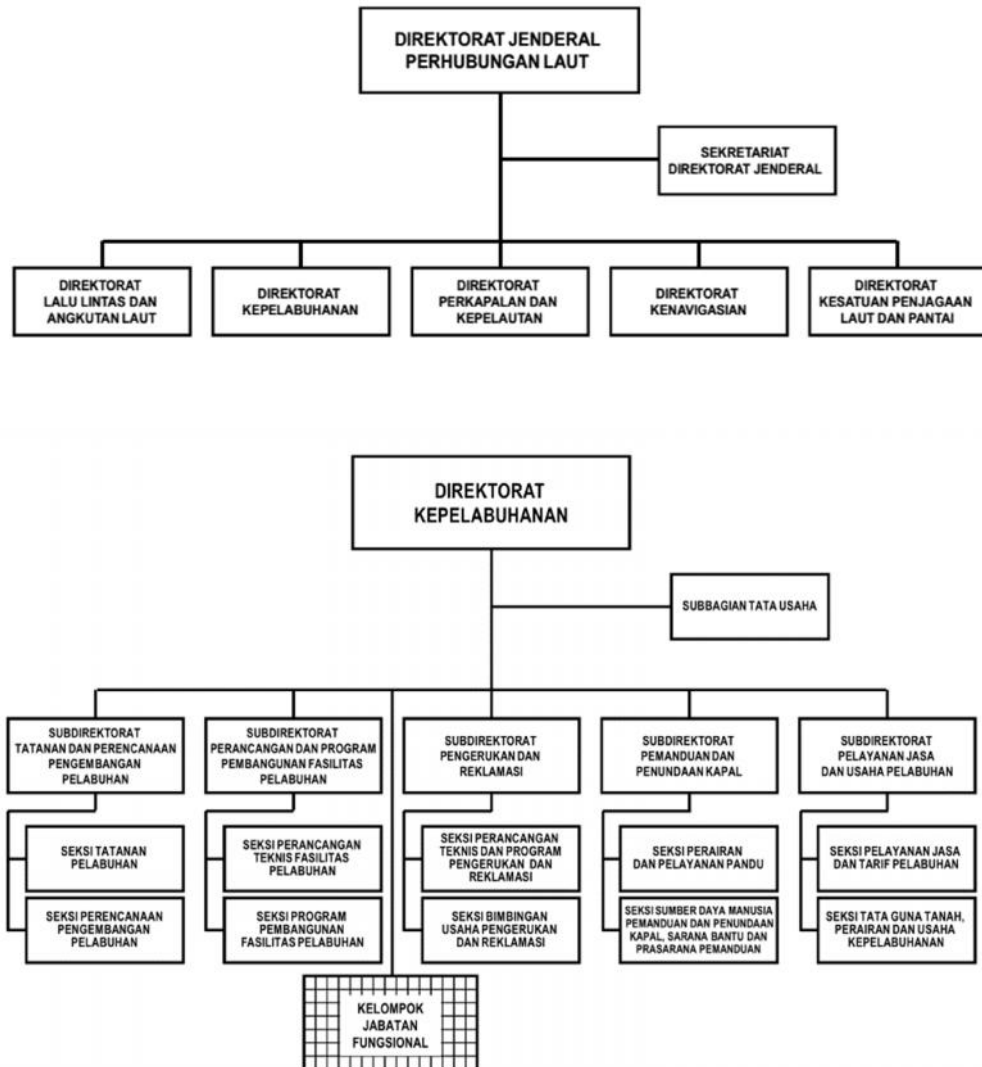
	Tahun						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
a. Penyusunan desain serta spesifikasi teknis.	■						
b. Pelaksanaan pelelangan.		■					
c. Pelaksanaan kegiatan konstruksi			■	■	■	■	■
d. Serah terima hasil pekerjaan Fase I Tahap I				■			
e. Serah terima hasil pekerjaan Fase II Tahap I							■

d. Alokasi Sumber Dana:

Uraian Kegiatan	Instansi Pelaksana	Pembiayaan (USD.000)				Ket.
		Pinjaman	Hibah	Dana Pendamping	Total	
Pembangunan Pelabuhan	Ditjen Hubla, Kemenhub					KPS/KPBU Operasi & Peralatan
TOTAL		USD 2.208.000.000		USD 595.000.000	USD 3.088.000.000	USD 285.000.000

e. Manajemen dan organisasi pelaksanaan kegiatan:

- 1) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kepelabuhanan : pelaksana;
- 2) Struktur organisasi pelaksana kegiatan.



11. Pengalaman Instansi Pelaksana dalam:

- a. melaksanakan kegiatan sejenis

Direktorat Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah berpengalaman dalam mengelola kegiatan sejenis pada pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kariangau, Pengembangan Pelabuhan Belang-belang, Pengembangan Pelabuhan Lembar, Pengembangan Pelabuhan Ternate.

- b. melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri
Direktorat Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah berpengalaman dalam mengelola kegiatan sejenis pada pekerjaan Pengembangan Pelabuhan Small Ports, Pengembangan Pelabuhan Dumai Fase III, Pengembangan Pelabuhan The Urgent Rehabilitation of Tanjung Priok.

12. Keterkaitan Dengan Kegiatan Yang Lain :

- √ Ada, sebutkan : 1. Pembangunan Jalan Akses ke Pelabuhan sepanjang 8 km x 30 m.
2. Rencana Akses Jalan Keretaapi ke Pelabuhan
- Tidak Ada

Penjelasan:

13. Pembelajaran Yang Diharapkan:

Melalui pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban Subang Jawa Barat ini diharapkan dapat dipeoleh pembelajaran mengenai:

- Peningkatan kualitas konstruksi bangunan dermaga, *breakwater* dan *seawall*;
- Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen konstruksi;
- Kelancaran operasi dan kinerja pelayanan pelabuhan;
- Keamanan dan keselamatan operasi pelayanan kapal dan barang di pelabuhan sesuai standard internasional;
- Efektifitas biaya pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelayanan barang dan kapal;
- Perencanaan dan pelaksanaan konsesi pembangunan dan pengoperasian fasilitas pelabuhan yang ideal;
- Harmonisasi kehidupan masyarakat dan
- Konservasi lingkungan alam di sekitar pelabuhan.

14. Rencana Keberlangsungan Kegiatan:

Hasil dari pelaksanaan kegiatan/output yang bersifat fisik akan dirawat dikelola oleh para penerima manfaat dari kegiatan ini, baik di instansi pusat maupun daerah.

Penanggung Jawab Usulan
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Pelaksana Tugas


DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630220 198903 1 001